

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2017.
- Djatnika, S. S. (2018). *Mitigasi Sengketa Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*. Indonesia Arbitrators Institute.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Firmansyah, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh. *Media Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, 178-186.
- Flanagan, R., & Norman, G. (1993). *Risk Management and Construction*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Gebken, R. J. (2006). *Quantification of Transactional Dispute Resolution Cost for The U.S. Construction Industry*. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy: The University of Texas at Austin.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2016). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- Halpin, Daniel, & Ronald. (1998). *Construction Management*. New York: John Wiley.
- Heywood, C., & Smith, J. (2006). Integrating Stakeholders during Community FM's Early Project Phase. *Facilities* Vol. 24 No 7-8, 300-313.
- Hidayat, F., & Gunawan, C. (2013). Analisis Karakteristik Penyelesaian Sengketa pada Proyek Konstruksi di Tingkat Mahkamah Agung. *Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)*, K97-K101.
- Ilma, D. A., Fitriyanti, F., Ma'arif, F., Baldah, N., & Utoyo, B. (2020). State of The Art Perselisihan Kontrak Konstruksi di Indonesia. *INERSIA*, Vol. XVI, No. 2, 158-170.
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 134, 2002*.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11, 2017*.
- Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245, 2020*.

- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Irawan, R., Rafi'e, & Pratiwi, R. (2016). Studi Perbandingan Standar dan prosedur Dokumen Kontrak FIDIC dengan Stadar Menteri Pekerjaan Umum. *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambah UNTAN Vol 2, No, 1-10*.
- Isa, R., & Emuze, F. (2015). Stakeholders' Perceptions of Construction Dispute Resolution Mechanism in Nigerian Construction., (pp. 12-20). Gold Coast. doi:10.32738/CEPPM.201509.0003
- Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa yang Sering Terjadi pada Proyek Konstruksi di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2015* (pp. 227-232). Surabaya: Universitas Narotama.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Mitropoulos, P., & Howell, G. (2001). Model for Understanding, Preventing, and Resolving Project. *Journal of Construction Engineering and Management*, 223-231.
- Nikoyama, R. (2017). *Sekuensial Penyebab Sengketa Konstruksi Dengan Menggunakan Metode Path Analysis*. Bandung: Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Project Management Institute. (2004). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge 3rd Edition*. Pennsylvania: Project Management Institute.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. (2017). *Modul 4 Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian PUPR.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. (2017). *Modul 6 Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian PUPR.
- Putra, N. E. (2020). Strategi Kontraktor Terhadap Resiko SLF dengan Pola Pembangunan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Kacapuri Jurnal Keilmuan Teknik Sipil Volume 3 Nomor 1*, 75-95.
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Sleman: Deepublish.
- Reinaldo, I. (2018). Sengketa izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Bangunan Gedung dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum, Vol. VI/No.3*, 142-152.

- Roberto, R. (2017). *Anatomi Sengketa Konstruksi Pada Proyek Bangunan Gedung di Indonesia*. Bandung : Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan.
- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2018, January). Masalah Sengketa Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Setiawati, A. (2020). Urgensi Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengguna/Penghuni Bangunan Gedung. *terAs Law Review Vol.1 No. 2*, 203-218.
- Sidik, J., Kania, B., & Naufal, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Di Luar Pengadilan Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Di Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol. 2, No. 1, Juni 2020*, 21-27.
- Slamet, S. R. (2016). Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Mengindari Sengketa. *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3*, 191-208.
- Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.